



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310  
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374  
www.bappenas.go.id

Nomor : 63 /PANSEL/04/2017 Jakarta, 26 April 2017  
Sifat : **SEGERA**  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  
Kementerian PPN/Bappenas

1. Yth. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara
  2. Yth. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Lembaga
  3. Yth. Para Sekretaris Utama Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK)
  4. Yth. Para Sekretaris Daerah Provinsi di Indonesia
- (sebagaimana daftar terlampir)

di

Tempat

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan Saudara untuk dapat menginformasikan pelaksanaan Seleksi Terbuka tersebut kepada seluruh PNS di lingkungan instansi Saudara. Informasi lengkap tentang persyaratan, jadwal seleksi dan lain-lain dapat dilihat melalui website <https://rekutmen.bappenas.go.id>

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas,  
Selaku Ketua Panitia Seleksi

Imron Bulkin

Tembusan:

Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Lampiran Surat  
Nomor : 03 /PANSEL/04/2017  
Tanggal : 26 April 2017

#### DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Kementerian Sekretaris Negara
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Luar Negeri
8. Kementerian Pertahanan
9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10. Kementerian Keuangan
11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Kementerian Perindustrian
13. Kementerian Perdagangan
14. Kementerian Pertanian
15. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16. Kementerian Perhubungan
17. Kementerian Kelautan dan Perikanan
18. Kementerian Ketenagakerjaan
19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
20. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21. Kementerian Kesehatan
22. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
23. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
24. Kementerian Sosial
25. Kementerian Agama
26. Kementerian Pariwisata
27. Kementerian Komunikasi dan Informatika
28. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
29. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
31. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
32. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
33. Kementerian Pemuda dan Olahraga
34. Sekretariat Kabinet
35. Arsip Nasional Republik Indonesia
36. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
37. Badan Pemeriksa Keuangan
38. Badan Kepegawaian Negara
39. Badan Pusat Statistik
40. Badan Standardisasi Nasional
41. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
42. Badan Tenaga Nuklir Nasional

43. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
44. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
45. Badan Koordinasi Penanaman Modal
46. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
47. Badan Pertanahan Nasional
48. Badan Intelijen Negara
49. Badan Informasi Geospasial
50. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
51. Badan Narkotika Nasional
52. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
53. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
54. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
55. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
56. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
57. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
58. Badan Pengawas Pemilu
59. Lembaga Administrasi Negara
60. Lembaga Sandi Nasional
61. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
62. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
63. Lembaga Ketahanan Nasional
64. Ombudsman Republik Indonesia
65. Dewan Ketahanan Nasional
66. Komisi Pemberantasan Korupsi
67. Komisi Pemilihan Umum
68. Komisi Nasional Hak Asasi Manusi
69. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
70. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
71. Provinsi Sumatera Utara
72. Provinsi Sumatera Barat
73. Provinsi Riau
74. Provinsi Sumatera Selatan
75. Provinsi Kepulauan Riau
76. Provinsi Jambi
77. Provinsi Bengkulu
78. Provinsi Bangka Belitung
79. Provinsi Lampung
80. Provinsi Banten
81. Provinsi DKI Jakarta
82. Provinsi Jawa Barat
83. Provinsi Jawa Tengah
84. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
85. Provinsi Jawa Timur
86. Provinsi Bali
87. Provinsi Nusa Tenggara Barat
88. Provinsi Nusa Tenggara Timur
89. Provinsi Kalimantan Barat
90. Provinsi Kalimantan Selatan

91. Provinsi Kalimantan Tengah
92. Provinsi Kalimantan Timur
93. Provinsi Kalimantan Utara
94. Provinsi Sulawesi Selatan
95. Provinsi Sulawesi Utara
96. Provinsi Sulawesi Tengah
97. Provinsi Sulawesi Tenggara
98. Provinsi Sulawesi Barat
99. Provinsi Gorontalo
100. Provinsi Maluku
101. Provinsi Maluku Utara
102. Provinsi Papua
103. Provinsi Papua Barat